

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkembang, melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan kebutuhan sarana dan prasarana bidang infrastruktur dengan tujuan mendorong percepatan pembangunan. Prinsip manajemen konstruksi terstandar digunakan sebagai landasan utama dalam rangkaian pelaksanaan proyek konstruksi dengan tujuan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Perencanaan dan pembangunan infrastruktur dilakukan langsung oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Tanpa mempertimbangkan prioritas kebutuhan utama masyarakat mengakibatkan hasil proyek tidak tepat guna dan kurang efisien. Untuk menghasilkan proyek yang tepat guna dan efisien, maka pemerintah mengubah paradigma pembangunan ke arah pola pelaksanaan pembangunan yang lebih mengutamakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Upaya ini dilakukan agar proyek pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hasil pembangunan bersifat berkelanjutan.

Program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pencairan dana, proses konstruksi dan pengoperasian/ penyerahan hasil pekerjaan. program pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat mengacu pada standar pedoman dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten hingga desa.

Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat perlu didukung dengan kebijakan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam perencanaan, pengadaan, pelaksanaan konstruksi dan penyerahan hasil pekerjaan;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan menumbuh kembangkan keswadayaan masyarakat secara berkelanjutan;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan partisipasif dan mendorong terciptanya kemitraan berbagai pihak dalam mendorong tersedianya sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan;

4. Optimalisasi peningkatan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mengembangkan pembangunan secara berkelanjutan;
5. Mendorong terbukanya aksesibilitas kawasan potensial untuk pertumbuhan ekonomi;

Dengan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan perbandingan secara riil dengan menggunakan proyek riil yang dilaksanakan dengan menggunakan manajemen konstruksi terstandar dan manajemen konstruksi berbasis masyarakat.

Pelaksanaan konstruksi berbasis masyarakat telah disusun sebagai panduan dalam rangkaian proses pelaksanaan proyek. Dengan adanya perbedaan masyarakat penerima proyek baik dari segi kemampuan ekonomi, pendidikan dan tatanan sosial, berakibat munculnya kendala-kendala yang dihadapi pada proses pelaksanaan proyek. Antara perencanaan dan kualitas hasil proyek sering tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perbedaan kepentingan dari stakeholder yang terlibat dalam proses pelaksanaan proyek sering menjadi faktor penyebabnya.

Analisis penerapan manajemen konstruksi berbasis masyarakat diperlukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan proyek mulai dari perencanaan hingga proses pemeliharaan untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan program di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan minimalisir masalah agar tujuan dari proyek dengan sistem pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan sesuai dengan standar pemerintah. Untuk mengetahui kendala- kendala yang ada selama pelaksanaan diperlukan penelitian mengenai penerapan manajemen konstruksi dengan sistem pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Bina Marga serta Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dalam pelaksanaan proyek pembangunan dengan sistem pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini berjudul “ANALISIS MANAJEMEN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA PEKERJAAN PEKERASAN JALAN RIGID *PAVEMENT* UNTUK JALAN REJOSO – GADING PASURUAN”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dilakukan, maka identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat
2. Kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan standart
3. Sering terjadi permasalahan antara penyedia jasa dengan masyarakat

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana perbedaan pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen konstruksi berbasis masyarakat bila dibandingkan manajemen konstruksi standar.
2. Bagaimana perbedaan penerapan fungsi manajemen dalam aspek mutu, biaya dan waktu pada manajemen konstruksi berbasis masyarakat.
3. Bagaimana penerapan sistem manajemen konstruksi standar dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat.

1.4. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian dalam kasus studi ini, diharapkan dapat mencapai sasaran atau tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis perbedaan pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen konstruksi berbasis masyarakat.
2. Menganalisis penerapan fungsi manajemen dalam aspek mutu, biaya dan waktu pada manajemen konstruksi berbasis masyarakat.
3. Menganalisis penerapan sistem antara penerapan manajemen konstruksi terstandar dan manajemen konstruksi berbasis masyarakat.

1.5. Batasan Penelitian

Sebagai batasan dalam penelitian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada proyek Rekonstruksi Jalan Rejoso – Gading Kabupaten Pasuruan.
2. Penelitian dilakukan pada tahap penyusunan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pengoperasian/ penyerahan hasil pekerjaan.

3. Penelitian dilakukan sampai pada tingkatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan khususnya Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.
4. Penelitian dimaksudkan untuk memberikan solusi guna meminimalisir kelemahan yang ada dalam manajemen konstruksi berbasis masyarakat.

1.6. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian dalam kasus studi ini, diharapkan dapat mencapai manfaat dari penelitian sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk Proyek Perkerasan Jalan, di Kabupaten Pasuruan yang menerapkan sistem pemberdayaan masyarakat pada tahun berikutnya.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga.
3. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, khususnya Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.
4. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut.